Jurnal Program Magister Ilmu Hukum

ISSN 2302-7010

NEGARA DAN KEADILAN

Volume 3 Nomor 4 / Agustus 2014

NEGARA DAN KEADILAN

PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
Oleh: M. Novrian Jaya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBIAYAAN (PENDANAAN) TERORISME
Oleh: Gunawan Kuntoro

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN
Oleh: Abdul Rokhim

PERJANJIAN PERKAWINAN YANG MEMUAT KLAUSULA YANG MENIADAKAN KEWAJIBAN ISTERI ATAS HUTANG RUMAH TANGGA
Oleh: Ansori

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Oleh: Diah Suatmi Prihatin

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM
Oleh: Sugeng Hartono

PENGUATAN PERDA TATA RUANG MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA MALANG
Oleh: H. Moh. Muhibbin., Nur Aini Rahmawati, Diyan Isnaini.

NIKAH *MIS – YAR* DAN HAK WANITA DALAM PERKAWINAN
Oleh : Sya'idun

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA
Oleh: Suratno

Diterbitkan oleh
Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jurnal Program Magister Ilmu Hukum
NEGARA DAN KEADILAN

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab
Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Ketua Dewan Penyunting
Dr. H. Moh Muhibbin, S.H., M.Hum.

Wakil Dewan Penyunting
Drs. H. Abdul Wahid, S.H., MAg.

Sekretaris Penyunting
Dr. Sunardi, S.H., M.H.

Dewan Penyunting
Dr. H. Moh Muhibbin, S.H., M.Hum.
Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.H.
H. Maryadi Faqih, S.H., M.H.
Suratman, S.H., M.Hum.

Mitra Bestari
Prof. Dr. H. Bambang Satriya, S.H., M.H.

Tata Usaha/Kesekretariatan
Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.
Moh. Faisol, S.H., M.H.
Imam Santoso

Alamat Redaksi :
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang Telp. 0341 565544 **e-mail:** negaradankeadilan@gmail.com

Diterbitkan oleh
Program Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jurnal Ilmiah bernama **Negara dan Keadilan** ini merupakan jurnal yang menyajikan tulisan, ide-ide, atau gagasan mutakhir mengenai problem hukum yang berelasi dengan masalah kenegaraan dan keadilan. Dalam jurnal ini diutamakan pada deskripsi dan diskursus hasil-hasil penelitian, baik oleh kalangan mahasiswa Program Pascasarjana, peneliti, maupun pakar di bidang ilmu hukum. Spesifikasi ini tidak lepas dari makin banyaknya kajian dan penelitian masalah hukum atau *legal case* yang dilakukan oleh peneliti dan pakar. Kondisi bangsa yang terus menerus diuji oleh problem hukum membutuhkan ide-ide cerdas dari pakar dan ahli guna memberikan jalan terang atau pencerahan.

Jurnal Program Magister Ilmu Hukum
NEGARA DAN KEADILAN

Pengantar Redaksi

Jurnal **Negara dan Keadilan** yang terbit kali ini tetap mendeskripsikan karya-karya peneliti tentang hukum dengan berbagai problem yang berkembang di tengah masyarakat.

Problem di tengah masyarakar memang beragam seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Ada problem yang tergolong serius, namun ada yang dalam kategori ringan. Meskipun demikian, problem itu tetap membutuhkan jawaban sesuai dengan esensi dan obyektifitasnya. Hukum merupakan norma yang bisa digunakan untuk memberikan jawabannya.

Problem di seputar perkawinan dan pembagian harta waris merupakan beberapa masalah, yang mengisi jurnal **Negara dan Keadilan**. Kedua masalah ini sering terjadi di masyarakat dan merupakan masalah yang tergolong sensitif.

Selain problem tersebut, masih banyak problem lain yang terjadi di tengah masyarakat, yang juga mengisi jurnal Negara dan Keadilan. Problem lain yang mengisi jurnal ini diantaranya tentang deskripsi kasus pendanaan terorisme. Kasus ini termasuk kasus yang sedang menjadi diskursus dewasa ini.

Selamat membaca dan semoga banyak memberikan manfaat

Malang, Pebruari 2014
Redaksi

Jurnal Program Magister Ilmu Hukum
NEGARA DAN KEADILAN

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii

PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
Oleh: M. Novrian Jaya 1

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBIAYAAN (PENDANAAN) TERORISME
Oleh: Gunawan Kuntoro 11

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN
Oleh: Abdul Rokhim 18

PERJANJIAN PERKAWINAN YANG MEMUAT KLAUSULA YANG MENIADAKAN KEWAJIBAN ISTERI ATAS HUTANG RUMAH TANGGA
Oleh: Ansori 31

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Oleh: Diah Suatmi Prihatin 38

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM
Oleh: Sugeng Hartono 45

PENGUATAN PERDA TATA RUANG MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA MALANG
Oleh: H. Moh. Muhibbin., Nur Aini Rahmawati, Diyan Isnaini. 51

NIKAH *MIS – YAR* DAN HAK WANITA DALAM PERKAWINAN
Oleh : Sya'idun 64

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA
Oleh: Suratno 71

IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
Oleh: Rakhmad Hadi Mulyo 78

METODE PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
Oleh: Agus Widyo Susanto 86

RELEVANSI IJTIHAD TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
"Study Kritis Konsep Ijtihad Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah"
Oleh: Zain Zuhri Sholeh 93

ANALISIS YURIDIS KEWARISAN ISLAM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI
Oleh: Yusuf Masruri 101

PENGUATAN PERDA TATA RUANG MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA MALANG

Oleh: H. Moh. Muhibbin.
Nur Aini Rahmawati.
Diyan Isnaini.

Abstract

Flooding events that hit some areas in the East Java town of Malang resulted in some current protocol roads and hundreds of homes were flooded in the city of Malang . Flood events like this will continue to occur every year , if the main cause is not immediately addressed in a planned manner . Therefore , the identification of the causes of flooding and formulated to look for a solution in real terms . In general , the main cause of flooding is the number of locations that should even become a green open space as a place to water infiltration such as urban forests , parks , and some areas in hydrological able to absorb excess water that is free of the building to a certain length , it was occupied by a permanent building . The rise of new housing , modern shopping centers and home stores in Malang , sewer shallow water and lack of adequate drainage currently considered the cause of the flood of new locations in the city of Malang .

***Keywords** : flooding , permanent buildings and policies*

PENDAHULUAN

Banjir yang melanda sebagian wilayah di kota Malang, Jawa Timur akibat hujan deras diakhir penghujung tahun 2007 merupakan banjir yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya sampai tahun 2012, yang mengakibatkan ratusan rumah warga di lima kelurahan terendam air dan ketinggian air mencapai dua meter, disamping itu banjir juga terjadi didalam kota atau jalan protokol di kota Malang. Diantara lima kelurahan tersebut adalah masing-masing Kelurahan Madyopuro, Lesanpuro, Kedung Kandang, Mergosono dan kelurahan Kota Lama. Peristiwa banjir seperti ini akan terus terjadi setiap tahun, apabila penyebab utamanya tidak segera dibenahi secara terencana. Oleh

sebab itu, identifikasi penyebab banjir harus dicari dan dirumuskan solusinya secara riil.

Secara umum, penyebab utama banjir di berbagai kota Malang, selain akibat rusaknya hutan- hutan di daerah hulu yang kemudian membawa air bah dan tanah ke kawasan hilir yang lebih rendah, juga lebih diperparah dengan banyaknya perkotaan yang tidak mempunyai rencana induk (master plan) yang baik untuk penataan sungai dan drainase. Banyak kota yang kurang menyediakan wilayah resapan seperti hutan kota, taman kota, dan beberapa kawasan yang secara hidrologis mampu menyerap kelebihan air.

Oleh karena itu, banjir di berbagai wilayah perkotaan dan pedesaan, bisa dihindari seandainya pemerintah dan masyarakat mempunyai kearifan lokal untuk menjaga taman dan atau hutan kota serta melaksanakan hasil studi dengan perencanaannya yang telah dibuat.

Kawasan perlindungan setempat, seperti daerah yang semestinya menjadi resapan air yang bebas bangunan sampai panjang tertentu, justru ditempati bangunan. Maraknya perumahan baru (real estat), pusat perbelanjaan Modern dan rumah toko (Rukoh) di Kota Malang, saat ini dinilai menjadi penyebab munculnya lokasi-lokasi banjir baru di Kota Malang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Malang, Hadi Santoso.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, bahwa bangunan rumah-rumah permanent sebagai wujud dari pembangunan perumahan yang terorganisir oleh para investor nampaknya tidak ada *outlet* atau saluran keluar air dari setem drainase. Beberapa lokasi banjir baru tersebut antara lain di simpang LA Sucipto, daerah Bunulrejo, Perempatan ITN, Bendungan Sutami, Perempatan Sumbersari dan sebagainya. Rata-rata di lokasi tersebut marak sedang dikembangkan perumahan-perumahan baru di Kota Malang.

Terjadinya serangkaian bencana banjir dalam kurun waktu yang relatif pendek dan selalu terulang setiap tahunnya menuntut upaya lebih besar untuk mengantisipasinya sehingga kerugian yang ditimbulkannya dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah daerah yang masih bersifat struktural (*structural approach*) ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir. Demikian pula kebijakan sektoral, sentralistik, dan *top-down* tanpa melibatkan masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut adanya desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi *stakeholder* terutama masyarakat yang terkena dampak bencana. Dengan demikian, maka penanggulangan banjir yang biasa dilakukan dengan pembangunan fisik semata (*structural approach*) harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (*nonstructural approach*) yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat sehingga tercapai hasil yang lebih optimal. Keterbukaan pemerintah untuk mengkomunikasikan setiap program-program pembangunan serta mengupayakan dan menerima partisipasi masyarakat merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.

Secara empiris, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dalam wujud peraturan perundang-undangan di kota Malang terkait dengan penanggulangan banjir belum dioptimalkan, sehingga menimbulkan banyaknya pelanggaran pembangunan yang mengakibatkan terjadinya banjir di kota Malang ini.

Selama ini peran serta masyarakat dalam penentuan pembuatan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang berupa Perda (Peraturan Daerah) yang didalamnya mengatur rencana penggunaan lahan dibeberapa

sebab itu, identifikasi penyebab banjir harus dicari dan dirumuskan solusinya secara riil.

Secara umum, penyebab utama banjir di berbagai kota Malang, selain akibat rusaknya hutan- hutan di daerah hulu yang kemudian membawa air bah dan tanah ke kawasan hilir yang lebih rendah, juga lebih diperparah dengan banyaknya perkotaan yang tidak mempunyai rencana induk (master plan) yang baik untuk penataan sungai dan drainase. Banyak kota yang kurang menyediakan wilayah resapan seperti hutan kota, taman kota, dan beberapa kawasan yang secara hidrologis mampu menyerap kelebihan air.

Oleh karena itu, banjir di berbagai wilayah perkotaan dan pedesaan, bisa dihindari seandainya pemerintah dan masyarakat mempunyai kearifan lokal untuk menjaga taman dan atau hutan kota serta melaksanakan hasil studi dengan perencanaannya yang telah dibuat.

Kawasan perlindungan setempat, seperti daerah yang semestinya menjadi resapan air yang bebas bangunan sampai panjang tertentu, justru ditempati bangunan. Maraknya perumahan baru (real estat), pusat perbelanjaan Modern dan rumah toko (Rukoh) di Kota Malang, saat ini dinilai menjadi penyebab munculnya lokasi-lokasi banjir baru di Kota Malang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Malang, Hadi Santoso.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, bahwa bangunan rumah-rumah permanent sebagai wujud dari pembangunan perumahan yang terorganisir oleh para investor nampaknya tidak ada *outlet* atau saluran keluar air dari setem drainase. Beberapa lokasi banjir baru tersebut antara lain di simpang LA Sucipto, daerah Bunulrejo, Perempatan ITN, Bendungan Sutami, Perempatan Sumbersari dan sebagainya. Rata-rata di lokasi tersebut marak sedang dikembangkan perumahan-perumahan baru di Kota Malang.

Terjadinya serangkaian bencana banjir dalam kurun waktu yang relatif pendek dan selalu terulang setiap tahunnya menuntut upaya lebih besar untuk mengantisipasinya sehingga kerugian yang ditimbulkannya dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah daerah yang masih bersifat struktural (*structural approach*) ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir. Demikian pula kebijakan sektoral, sentralistik, dan *top-down* tanpa melibatkan masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut adanya desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi *stakeholder* terutama masyarakat yang terkena dampak bencana. Dengan demikian, maka penanggulangan banjir yang biasa dilakukan dengan pembangunan fisik semata (*structural approach*) harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (*nonstructural approach*) yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat sehingga tercapai hasil yang lebih optimal. Keterbukaan pemerintah untuk mengkomunikasikan setiap program-program pembangunan serta mengupayakan dan menerima partisipasi masyarakat merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.

Secara empiris, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dalam wujud peraturan perundang-undangan di kota Malang terkait dengan penanggulangan banjir belum dioptimalkan, sehingga menimbulkan banyaknya pelanggaran pembangunan yang mengakibatkan terjadinya banjir di kota Malang ini.

Selama ini peran serta masyarakat dalam penentuan pembuatan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang berupa Perda (Peraturan Daerah) yang didalamnya mengatur rencana penggunaan lahan dibeberapa